
BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. VISI DAN MISI

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (RPJMD) menyatakan bahwa visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah:

Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari **"Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"**

Atas visi tersebut ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, yaitu:

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*";
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat; dan
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

B. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Gambaran capaian setiap misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 di akhir tahun anggaran 2018 sebagai berikut:

1. Misi Pertama, Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan.

Misi ini bertujuan memberikan haluan pada 6 misi yang lain dalam pengamalan ajaran Tri Sakti Bung Karno. Misi ini memiliki beberapa sasaran, yaitu: Meningkatnya demokratisasi, kesejahteraan dan nilai-nilai budaya berbasis ajaran Trisakti Bung Karno; Terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal; terjaminnya ketersediaan energi dengan potensi

lokal; Meningkatnya partisipasi politik masyarakat; dan meningkatnya pemahaman masyarakat atas budaya Jawa.

Strategi yang dirumuskan untuk mewujudkan misi pertama ini adalah: Mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam mengatasi permasalahan dan upaya pencapaian target pembangunan daerah melalui peningkatan partisipasi politik, konsultasi, koordinasi, komunikasi, demokratisasi, pemanfaatan potensi lokal, kerjasama dan kemitraan, serta memelihara nilai-nilai kearifan kebudayaan.

Arah kebijakan pada misi ini adalah Mewujudkan reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan etika dan budaya politik masyarakat, memperkuat ekonomi kerakyatan dan membangun budaya gotong-royong sebagai nilai-nilai dasar Trisakti Bung Karno.

Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2018 yang mendukung misi ini sebanyak 15 indikator, dengan 1 indikator Indeks Demokrasi Indonesia belum ada data karena baru akan di rilis oleh BPS pada bulan Agustus 2019. Dari 14 indikator yang telah tersedia data realisasi capaiannya, sebanyak 12 indikator kinerja (85,71%) mencapai target dan 2 indikator (14,29%) belum mencapai target. Gambaran realisasi indikator kinerja sasaran yang mendukung misi pertama sebagai berikut:

Tabel 2.1. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran yang Mendukung Misi Pertama

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2018	Realisasi 2018
1	Persentase capaian sasaran pembangunan (%)	100	91,09
2	Ketersediaan pangan utama (Ton Beras)	5.816.198	6.277.465
3	Persentase penguatan cadangan pangan	100	137,29
4	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	100	100
5	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80	96,93
6	Persentase penanganan daerah rawan pangan	60	100
7	Produksi padi (ton)	10.351.427	11.536.595
8	Produksi jagung (ton)	3.053.181	3.433.420
9	Produksi kedele (ton)	154.795	162.964
10	Produksi tebu (ton)	4.460.000	2.757.659
11	Produksi daging (kg)	293.353.639	347.723.159
12	Rasio Elektrifikasi (%)	94,00	98,52
13	Persentase pemanfaatan EBT terhadap total konsumsi energi	10,2	10,80
14	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Tengah	70,5	NA
15	Persentase penerapan indikator SPM kesenian (gelar seni, sarana kesenian, penyelenggaraan misi kesenian)	100	100

2. Misi Kedua, Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran.

Misi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu: Menurunkan jumlah penduduk miskin; menurunkan jumlah penganggur; Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui kedaulatan pangan dan kedaulatan energi; mengembangkan koperasi dan UMKM; Meningkatkan kelembagaan ekonomi pedesaan; Meningkatkan produk berkualitas ekspor dan penggunaan produk dalam negeri; Meningkatkan iklim dan pengembangan investasi; Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan; Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS.

Sasaran yang dirumuskan dalam misi ini adalah: Menurunnya angka kemiskinan; Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka; Terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal; Terjaminnya ketersediaan energi dengan potensi lokal; Meningkatnya jumlah dan kualitas daya saing dan produktivitas koperasi dan UMKM; Meningkatnya kelembagaan ekonomi pedesaan; Meningkatnya kualitas produk unggulan orientasi ekspor dan pengendalian impor non migas; Meningkatnya realisasi investasi; Meningkatnya keadilan gender dan perlindungan anak; Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan terhadap perempuan dan anak termasuk anak berkebutuhan khusus; Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan; Meningkatnya kualitas dan keterampilan masyarakat; Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM.

Strategi yang dirumuskan untuk mewujudkan misi ini adalah: Pengurangan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin; Peningkatan kapasitas dan keterampilan pencari kerja; perluasan dan pengembangan kesempatan kerja; peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja; Peningkatan penerapan hasil penelitian dan pengembangan iptek serta inovasi; Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan; Peningkatan akses masyarakat terhadap pangan; Peningkatan diversifikasi dan konsumsi melalui sumber daya lokal; Perlindungan petani dan lahan pertanian serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian; Optimalisasi pemanfaatan potensi panas bumi, energi alternatif, dan peningkatan jaringan listrik perdesaan; Peningkatan budaya hemat energi; Peningkatan fasilitasi pengembangan wirausaha baru; Peningkatan produktivitas dan kapasitas Koperasi dan UMKM; Pengembangan kelembagaan ekonomi pedesaan; Peningkatan penguasaan akses dan informasi pasar, kemitraan/kerjasama usaha serta mengembangkan keunggulan lokal; Peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif; Peningkatan iklim investasi yang berdaya saing berbasis keunggulan daerah; Peningkatan pendapatan masyarakat sekitar destinasi pariwisata; pengarusutamaan gender dan hak anak; Penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak; Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan

penyelenggaraan pendidikan; Peningkatan kualitas dan ketrampilan masyarakat; dan Peningkatan perlindungan, pemberian jaminan dan pemberdayaan PMKS.

Arah kebijakan dirumuskan dalam misi ini yaitu: Mengurangi penduduk miskin diprioritaskan pada wilayah kabupaten/kota dengan persentase di atas rata-rata Jawa Tengah; Memprioritaskan pendidikan kejuruan dan keterampilan SDM berbasis kompetensi; Optimalisasi penerapan Sapta Usaha Tani didukung pemanfaatan teknologi dan modernisasi alat mesin pertanian berwawasan lingkungan; mengembangkan regulasi ketahanan pangan/kedaulatan pangan termasuk alih fungsi lahan pertanian yang didukung dengan reformasi agraria; meningkatkan ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, kualitas, keamanan pangan berbasis sumber daya lokal dan penanganan rawan pangan serta penyediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat; meningkatkan pemanfaatan potensi panas bumi dan energi alternatif dengan penggunaan pilihan teknologi sederhana, tepat guna dan ramah lingkungan; Meningkatkan pembangunan jaringan listrik perdesaan; meningkatkan budaya hemat energi; mengembangkan wirausaha baru diarahkan pada usaha kreatif bernilai tambah tinggi; meningkatkan fasilitas akses modal kerja, pembimbingan teknis dan pendampingan manajerial Koperasi dan UMKM berbasis sumber daya lokal; optimalisasi kelembagaan ekonomi perdesaan; optimalisasi pengembangan akses dan informasi pasar melalui perkuatan jejaring sentra dan klaster; peningkatan kualitas, keberagaman, produktivitas, dan promosi serta mendorong penerapan standar mutu produk lokal; membangun kesadaran bersama untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri; mendorong terciptanya iklim investasi yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan kebijakan nasional dan global; meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata; mendorong percepatan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA); meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak; meningkatkan kualitas pelayanan penanganan kasus kekerasan berbasis gender, anak dan *trafficking*; meningkatkan upaya pencegahan, penanganan dan pengurangan risiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap perempuan dan anak; meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dengan pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada jenjang pendidikan dasar dan pemberian Bantuan Siswa Miskin pada jenjang pendidikan menengah; meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pendidik; meningkatkan ketrampilan dan kewirausahaan masyarakat; dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana panti rehabilitasi sosial serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2018 yang mendukung misi ini sebanyak 44 indikator, dengan 2 indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) belum ada data karena baru akan di rilis oleh BPS pada bulan Desember 2019. Dari 42 indikator yang telah tersedia data realisasi capaiannya, sebanyak 33 indikator kinerja (78,57%) mencapai target dan 9 indikator (21,43%) belum mencapai target. Gambaran realisasi indikator kinerja sasaran yang mendukung misi pertama sebagai berikut:

Tabel 2.2. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran yang Mendukung Misi Kedua

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2018	Realisasi 2018
1	Persentase Angka Kemiskinan	10,40-9,93	11,19%
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,13	4,51
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	73,55	68,56
4	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Usia Kerja (%)	72,63	65,50
5	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (orang)	34.825.055	48.943.607
6	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (orang)	419.454	677.168
7	Jumlah rintisan desa mandiri/ berdikari (desa)	100	100
8	Jumlah regulasi kedaulatan pangan	1	1
9	Ketersediaan pangan utama (ton beras)	5.816.198	6.277.465
10	Persentase penguatan cadangan pangan (%)	100	137,29
11	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah (%)	100	100
12	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	80	96,93
13	Produksi padi (ton)	10.351.427	11.536.595
14	Produksi jagung (ton)	3.053.181	3.433.420
15	Produksi kedele (ton)	154.795	162.964
16	Produksi tebu (ton)	4.460.000	2.757.659
17	Produksi daging (kg)	293.353.639	347.723.159
18	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	11,88	8,37
19	Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	1,45	1,40
20	Kontribusi sub sektor pe-ternakan terhadap PDRB (%)	2,39	2,50
21	Produksi perikanan tangkap (ton)	293.474,54	446.277,16
22	Produksi perikanan budidaya (ton)	509.436,29	510.324,49
23	Tingkat konsumsi ikan (Kg/Kapita/ Tahun)	22,59	30,65
24	Rasio Elektrifikasi (%)	94,00	98,52
25	Persentase pemanfaatan EBT terhadap total konsumsi energi	10,2	10,80
26	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	2,04	2,22
27	Jumlah produk/komoditas OVOP	245	245
28	Persentase koperasi sehat	19,50	20,38
29	Persentase koperasi aktif	82,50	82,50
30	Jumlah BUMDes yang terfasilitasi (unit)	29	29
31	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	35,10	34,50
32	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	13,57	13,51
33	Pertumbuhan Proyek PMA/ PMDN	12	54,92
34	Pertumbuhan Nilai investasi PMA dan PMDN	12	15,00
35	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	69,99	NA
36	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,99	NA
37	Rasio Kabupaten/Kota menuju Kota Layak Anak	100	100
38	APK SMA/SMALB/MA/ Paket C (%)	80	80,01
39	Jumlah kewirausahaan pemuda (orang)	2.000	2.000
40	Rasio Desa Inovatif (%)	0,68	0,68
41	Rasio Kab/Kota Inovatif (%)	100	100
42	Rasio Klaster Inovatif (%)	85,71	85,71

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2018	Realisasi 2018
43	Persentase penanganan PMKS (%)	0,69	1,10
44	Persentase penguatan PSKS (%)	1,64	3,98

3. Misi Ketiga, Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapus!*".

Misi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu: Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, tersertifikasi, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan prima; Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel; Melaksanakan penegakan hukum.

Sasaran yang dirumuskan dalam misi ini adalah: Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparatur yang tersertifikasi dan berintegritas serta sistem pola karier yang jelas; Meningkatkan cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah; Meningkatkan cakupan layanan pengukuran ISO terhadap unit pelayanan publik; Terwujudnya kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); Terwujudnya tertib administrasi kependudukan; Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua; Tercapainya laporan keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian; Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Terwujudnya peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP); Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Strategi yang dirumuskan untuk mewujudkan misi ini adalah: Peningkatan kapasitas dan integritas SDM aparatur; Peningkatan pengelolaan dan keterbukaan pengembangan sistem karier kepegawaian; Peningkatan kapasitas SDM aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik; Peningkatan sistem tata kerja birokrasi yang transparan dan akuntabel; Pengembangan sistem pelayanan publik yang transparan berbasis teknologi informasi; Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik; Peningkatan kapasitas SDM penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); Peningkatan implementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di provinsi dan seluruh kabupaten/kota; Peningkatan manajemen administrasi keuangan dan aset; Pengintegrasian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di seluruh SKPD Provinsi; Penegakan peraturan perundang-undangan daerah; dan Peningkatan implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Arah kebijakan dirumuskan dalam misi ini yaitu: Mengembangkan sumber daya aparatur yang terintegritas, netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera dan sistem pembinaan karier yang terbuka; Memprioritaskan perubahan cara pandang dan perilaku dari birokrat menjadi pelayan publik; Meningkatkan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi; Meningkatkan kualitas pelayanan berupa kecepatan, kemudahan dan kepastian serta transparansi proses

perizinan; meningkatkan investasi pada seluruh kabupaten/kota; Mengimplementasikan aksi PPK yang difokuskan pada peningkatan kemudahan berusaha, transparansi perencanaan dan penganggaran, serta transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah; Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, optimalisasi pemberdayaan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; Menerapkan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi; Mengoptimalkan proses penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah; Menerapkan kebijakan peraturan perundang-undangan serta penanganan terhadap pelanggaran peraturan daerah; dan Meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Indikator kinerja sasaran yang mendukung misi ini sebanyak 15 indikator. Gambaran capaian indikator sasaran pada misi ketiga yaitu: sebanyak 13 indikator (86,67%) mencapai target dan 2 indikator (13,33%) belum mencapai target. Capaian seluruh indikator kinerja sasaran yang mendukung misi ketiga disajikan dalam Tabel 2.3. sebagai berikut:

Tabel 2.3. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran yang Mendukung Misi Ketiga

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2018	Realisasi 2018
1	Jumlah PNS yang mengikuti sertifikasi kompetensi (orang)	50	560
2	Jumlah PNS yang melaksanakan tugas belajar dan ijin belajar (orang)	S3: 4 S2 : 18	S3 : 6 S2 : 521
3	Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang dilakukan pengukuran IKM (unit)	28	146
4	Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang bersertifikasi ISO (unit)	34	34
5	Persentase penyelesaian Izin dan Non Izin sesuai SOP	90	96,90
6	Rasio penduduk memiliki e-KTP per wajib e-KTP (%)	100	99,26
7	Persentase penduduk 0-18 th memiliki akta kelahiran (%)	90	103,98
8	Implementasi Aksi PPK	Prov dan 35 K/K	Prov dan 35 K/K
9	Opini BPK (WTP)	provinsi & 22 kab/kota	provinsi & 31 kab/kota
10	Persentase Dividen	7,10	7,27
11	Persentase laporan keuangan daerah berbasis akual (%)	100	100
12	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3
13	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3
14	Jumlah peraturan perundang-undangan daerah yang disusun (dok)	15	14
15	Persentase penindakan pelanggaran perda (%)	100	100

4. Misi Keempat, Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan.

Tujuan pada misi ini adalah: Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama; Memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dan 3 pilar kebangsaan dalam budaya dan jati diri masyarakat; Meningkatkan partisipasi politik masyarakat; Mewujudkan budaya Jawa Tengah yang semakin berkembang pada semua aspek kehidupan.

Sasaran yang dirumuskan dalam misi ini adalah: Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama; Meningkatnya peran kelembagaan sosial masyarakat dalam menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya dan jati diri bangsa; Meningkatnya upaya revolusi mental dan jiwa kebhinekaan guna membangun karakter bangsa; Penguatnya semangat kebangsaan, persatuan dan jiwa patriotik; Meningkatnya partisipasi politik masyarakat; Meningkatnya peran partai politik dan organisasi masyarakat dalam proses demokrasi; Meningkatnya pemahaman masyarakat atas budaya Jawa; Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang dijiwai oleh keluhuran budaya Jawa; Meningkatnya pelaksanaan tradisi budaya Jawa dalam kehidupan masyarakat.

Strategi yang dirumuskan untuk mewujudkan misi ini adalah: Penguatan peran lembaga keswadayaan masyarakat dalam menjaga kondusivitas daerah; Perluasan pengembangan wawasan kebangsaan bagi masyarakat; Peningkatan pendidikan politik masyarakat melalui pendidikan formal dan non formal; Penguatan kapasitas kader partai politik dan relawan organisasi masyarakat; Perumusan kebijakan dan peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik; dan Pelestarian dan pengembangan seni dan budaya Jawa melalui lembaga pendidikan, penyelenggaraan *event* tertentu dan penggunaan atribut-atribut Jawa dalam kegiatan formal.

Berbagai arah kebijakan dirumuskan dalam misi ini yaitu: Meningkatkan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelegen Daerah (Kominda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) terutama pada wilayah yang rawan konflik; Meningkatkan wawasan kebangsaan bagi masyarakat; Meningkatkan pendidikan politik masyarakat terutama kelompok pemilih pemula dan masyarakat berpendidikan rendah; Meningkatkan kapasitas kader partai politik dan relawan Ormas yang terdaftar; Meningkatkan komitmen politik dan kapasitas perempuan di bidang politik; Meningkatkan pendidikan karakter dan budaya sejak dini; dan Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya.

Indikator kinerja sasaran yang mendukung misi ini sebanyak 9 indikator. Gambaran capaian indikator sasaran pada misi keempat yaitu: sebanyak 8 indikator (88,89%) mencapai target dan 1 indikator (11,11%) belum mencapai target, yaitu indikator persentase cakupan venue sport and youth center Jatidiri yang memadai. Capaian seluruh indikator kinerja sasaran yang mendukung misi keempat disajikan dalam Tabel 2.4. sebagai berikut:

Tabel 2.4. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran yang Mendukung Misi Keempat

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2018	Realisasi 2018
1	Persentase penanganan konflik sosial	100	100
2	Persentase penerapan wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi (%)	100	100
3	Kesiapsediaan komponen pendukung dan cadangan (%)	100	100
4	Persentase peningkatan prestasi olahraga (%)	25	25
5	Persentase cakupan <i>venue sport and youth center</i> Jatidiri yang memadai (%)	100	92,86
6	Persentase penggunaan hak pilih dalam Pilkada Kabupaten/kota	75	77,40
7	Persentase penerapan indikator SPM kesenian (Gelar Seni, Sarana Kesenian, Penyelenggaraan Misi Kesenian) (%)	100	100
8	Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	2,5	2,50
9	Penerapan kurikulum muatan lokal Bahasa Jawa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (%)	100	100

5. Misi Kelima, Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak.

Tujuan pada misi ini adalah: Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan; Meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat.

Sasaran yang dirumuskan dalam misi ini adalah: Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan; Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah; Meningkatnya ketepatan waktu dan mutu pelaksanaan pembangunan daerah.

Strategi yang dirumuskan untuk mewujudkan misi ini adalah: Pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan; Peningkatan partisipasi dan fungsi kontrol masyarakat, perguruan tinggi, Ormas dan dunia usaha dalam pembangunan; Peningkatan sosialisasi kebijakan dan hasil pembangunan kepada masyarakat; dan Peningkatan pemerataan pembangunan daerah.

Arah kebijakan dirumuskan dalam misi ini yaitu: Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui forum rembug; Meningkatkan partisipasi aktif forum anak dalam pembangunan; Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan; Mempublikasikan kebijakan dan hasil pembangunan melalui media massa; dan Meningkatkan pemerataan pembangunan dengan pendekatan kewilayahan.

Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2018 yang mendukung misi ini sebanyak 4 indikator, dengan 1 indikator Indeks Williamson belum ada data karena baru akan di rilis oleh BPS pada bulan September 2019. Dari 3 indikator yang telah tersedia data realisasi capaiannya, sebanyak 2 indikator kinerja (66,67%) mencapai target dan 1 indikator (33,33%) belum mencapai target. Gambaran realisasi indikator kinerja sasaran yang mendukung misi pertama sebagai berikut:

Tabel 2.5. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran yang Mendukung Misi Kelima

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2018	Realisasi 2018
1	Persentase pelaksanaan <i>rembug</i> masyarakat dalam pengambilan keputusan (%)	100	100
2	Rasio Forum Anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan	71,4	83,33
3	Indeks Gini	0,337	0,357
4	Indeks Williamson	0,6986	NA

6. Misi Keenam, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat.

Tujuan pada misi ini adalah: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan; Meningkatkan budaya baca masyarakat; Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman; Meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian dalam arti luas.

Sasaran yang dirumuskan dalam misi ini adalah: Menurunnya angka kematian dan angka kesakitan; Menurunnya *Drop Out* (DO) KB dan *Unmet Need* serta meningkatnya peserta KB aktif/ *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR); Meningkatnya kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan; Meningkatnya kualitas pendidikan; Meningkatnya budaya baca masyarakat; Meningkatnya pemenuhan kebutuhan akses aman air minum, sanitasi, rumah layak huni; Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat.

Strategi yang dirumuskan untuk mewujudkan misi ini adalah: Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta peningkatan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan; Optimalisasi pelayanan KB; Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan; Peningkatan budaya baca masyarakat; Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan lingkungan permukiman; Peningkatan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di perkotaan dan perdesaan; Peningkatan dan pengembangan kondisi prasarana sarana dan ketersediaan air baku serta kondisi jaringan irigasi untuk menunjang peningkatan produktivitas pertanian dan air minum; dan Pemantapan kinerja dalam rangka pengawalan pencapaian target SPM dalam 9 (sembilan) bidang urusan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Arah kebijakan dirumuskan dalam misi ini yaitu: Meningkatkan pemenuhan prasarana sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta pemerataan tenaga medis; Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan; Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perpustakaan; Meningkatkan kualitas RTLH dan lingkungan permukiman kumuh khususnya pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah; Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana sarana serta sistem penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat dan institusi (SPAM dan TPA Regional); Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana jaringan irigasi serta pengembangan tampungan air baku secara berkelanjutan; Meningkatkan kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipasi, penyediaan air bersih dan sanitasi serta air baku berbasis pemberdayaan; dan Meningkatkan capaian kinerja untuk mengawal pencapaian target SPM dalam setiap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2018 yang mendukung misi ini sebanyak 23 indikator, 3 indikator yang belum ada data yaitu Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah akan di rilis April 2019. Dari 20 indikator yang telah tersedia data realisasi capaiannya, sebanyak 18 indikator kinerja (90%) mencapai target dan 2 indikator (10%) belum mencapai target. Gambaran realisasi indikator kinerja sasaran yang mendukung misi pertama sebagai berikut:

Tabel 2.6. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran yang Mendukung Misi Keenam

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2018	Realisasi 2018
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	75,05	NA
2	Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000 KH	116	78,60
3	Angka Kematian Bayi (AKB) /1000 KH	11	8,36
4	Angka Kematian Balita (AKABA)/1000 KH	11	9,48
5	Angka Kematian DBD (%)	<2	1,05
6	Angka Kesakitan DBD (Per100.000 pddk)	<47	10,20
7	Persentase <i>Drop Out</i> Keluarga Berencana (%)	13,50	9,85
8	Persentase <i>Unmetneed</i> (%)	9	13,06
9	<i>Contraceptive Prevalence Rate</i> (CPR) / Peserta KB Aktif (%)	80,00	73,69
10	Rata-rata lama sekolah	7,15	NA
11	Harapan lama sekolah	13,35	NA
12	APM SMA/ SMALB/MA/Paket C (%)	66	66,03
13	Angka Kelulusan SMA/ MA/ SMK (%)	99,99	100
14	Persentase SMA/SMALB/MA/SMK yang terakreditasi (%)	100	100

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2018	Realisasi 2018
15	Persentase pendidik SMA/SMALB/ MA/SMK berkualifikasi S1/D4 (%)	98,86	98,86
16	Jumlah pengunjung perpustakaan provinsi pertahun (orang)	934.302	3.041.019
17	Persentase perpustakaan desa yang sudah dilakukan pembinaan (%)	385/4,93	385/4,93
18	Persentase cakupan layanan air minum perkotaan (%)	79,50	82,89
19	Persentase cakupan layanan air minum perdesaan (%)	72,50	74,78
20	Persentase cakupan layanan sanitasi (%)	81,50	82,00
21	Rasio rumah layak huni	78,78	83,10
22	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	82,00	82,00
23	Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (%)	60,80%	60,89

7. Misi Ketujuh, Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Tujuan pada misi ini adalah: Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi; Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi; Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan; Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana.

Sasaran yang dirumuskan dalam misi ini adalah: Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan; Meningkatnya ketersediaan dan kondisi moda serta keselamatan transportasi; Meningkatnya penanganan banjir dan rob serta pantai kritis di muara sungai; Meningkatnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur dan transportasi strategis dan peran serta masyarakat; Meningkatnya cakupan masyarakat pengguna sarana teknologi komunikasi dan informasi; Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan; Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Strategi yang dirumuskan untuk mewujudkan misi ini adalah: Peningkatan kualitas dan kapasitas penanganan jalan dan jembatan; Peningkatan kinerja kondisi baik jalan dan jembatan; Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana kebinamargaan serta kapasitas SDM; Peningkatan prasarana sarana dan pengembangan antar moda transportasi publik; Peningkatan prasarana sarana keselamatan transportasi; Peningkatan prasarana sarana pengendalian banjir, dan peningkatan penanganan rob serta pantai kritis di muara sungai; Peningkatan kerjasama dalam pengembangan, penyediaan dan penanganan infrastruktur dan transportasi strategis untuk percepatan penanganan kebutuhan dan masyarakat; Fasilitasi pemenuhan cakupan sarana komunikasi dan informasi; Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang berbasis DAS; Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH); Peningkatan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir; Peningkatan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan; Pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan

bencana dan masyarakat; dan Meningkatkan koordinasi antar stakeholder dalam penanggulangan bencana.

Arah kebijakan dirumuskan dalam misi ini yaitu: Meningkatkan struktur, pelebaran, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala serta menjaga kondisi baik jalan dan jembatan, dengan mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan; Meningkatkan penanganan pada ruas jalan dan jembatan utamanya untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan pengembangan wilayah (ruas perbatasan provinsi, akses wisata, akses penghubung Pantura-Pansela, pembangunan perkotaan dan perdesaan, alternatif jalan nasional dan akses langsung jalan arteri, daerah rawan bencana dan strategis lainnya); Meningkatkan ketersediaan peralatan penanganan jalan dan SDM teknis kebinamargaan serta pengembangan sistem informasi manajemen dan publik; Meningkatkan penataan sistem transportasi antar moda, pengembangan angkutan massal (*mass rapid transport*) di wilayah perkotaan, perluasan jangkauan pelayanan transportasi di perdesaan serta peningkatan keselamatan lalu lintas secara komprehensif dan terpadu bersama dengan Pemerintah dan Pemerintah kabupaten/kota; Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana sarana pengendalian banjir dan pantai kritis di muara sungai utamanya pada Wilayah Sungai Bodri Kuto dan Pemali Comal; Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam pengembangan, penyediaan dan penanganan infrastruktur strategis utamanya kewenangan pemerintah dan kabupaten/kota (jalan tol, jalan strategis pendukung perekonomian, waduk/embung, irigasi, pengendalian daya rusak air), Transportasi (bandar udara, pelabuhan, terminal, kereta api dan ASDP); Pengembangan infrastruktur lintas kabupaten/kota dan penanganan rob utamanya di wilayah Pantura, penanganan Rawa Pening dan Segara Anakan; Meningkatkan upaya dukungan pembiayaan dan penanganan dari Pemerintah dan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*), *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta mengupayakan dukungan Pemerintah Provinsi dalam peningkatan kondisi infrastruktur kabupaten/kota dan desa; Meningkatkan peran swasta dalam pemenuhan jaringan komunikasi; Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; Meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pihak terhadap fungsi dan manfaat penataan ruang berbasis DAS sebagai langkah awal sebelum penerapan sanksi atas penegakan Perda; Meningkatkan pengelolaan dan sebaran RTH; Meningkatkan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir dengan melibatkan peran aktif masyarakat; Meningkatkan pengendalian kerusakan dan rehabilitasi lingkungan hidup; dan Meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi).

Indikator kinerja sasaran yang mendukung misi ini sebanyak 14 indikator. Gambaran capaian indikator sasaran pada misi keenam yaitu: sebanyak 13 indikator (92,86%) mencapai target dan 1 indikator (7,14%) belum mencapai target. Capaian seluruh indikator kinerja sasaran yang mendukung misi ketujuh disajikan dalam Tabel 2.7. sebagai berikut:

Tabel 2.7. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran yang Mendukung Misi Ketujuh

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2018	Realisasi 2018
1	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik (%)	89,60	89,60
2	Persentase panjang jalan dengan lebar \geq 6,00 m (%)	77,87	77,87
3	Persentase panjang jalan provinsi sebagai jalan kolektor (MST \geq 8 Ton) (%)	82,30	82,30
4	Meningkatnya ketersediaan prasarana keselamatan jalan provinsi (%)	60	92,15
5	Meningkatnya ketersediaan prasarana keselamatan perlintasan KA di jalan provinsi	25	25
6	Menurunnya luasan daerah akibat genangan akibat banjir (Ha)	3% (menurunnya 5000 Ha)	3,00 % (menurun sebesar 5.004 Ha menjadi 141.801 Ha)
7	Terfasilitasinya pembangunan infrastruktur strategis (%)	100	100
8	Persentase SKPD yang mengembangkan teknologi informasi	100	100
9	Persentase informasi status mutu air (%)	100	100
10	Persentase informasi status mutu udara ambien (%)	100	100
11	Persentase pengaduan akibat dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (SPM) (%)	100	100
12	Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%)	30	30,76
13	Persentase kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	0,93	0,47
14	Jumlah Desa Tangguh Bencana	68	106

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2017 tentang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2018, maka pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018 diarahkan pada upaya penuntasan capaian sasaran dan target akhir pembangunan jangka menengah tahun 2013-2018. Dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya, dan berbagai permasalahan serta isu strategis, maka kebijakan pembangunan daerah tahun 2018 ditujukan untuk "Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berdikari". Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2018 tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2018, meliputi:

1. Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.
 - a. Program yang mendukung prioritas ini adalah Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM; Program Pengembangan Produk Unggulan

Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal; Program Peningkatan Ekspor, Promosi, dan Efisiensi Impor; Program Pengembangan Industri Logam, Mesin, dan Tekstil; Program Pengembangan Industri Agro, Kimia, dan Hasil Hutan; Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka; Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Inventasi; Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Program Pemasaran Pariwisata.

- b. Indikator Kinerja Pembangunan yang mendukung penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan sebanyak 12 Indikator. Sebanyak 8 indikator (66,67%) mencapai target dan 4 indikator kinerja (33,33%) belum mencapai target. Gambaran realisasi dari 12 indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.8. Realisasi Indikator Kinerja Prioritas Pertama Pembangunan Daerah Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Target 2018	Realisasi 2018
1	Jumlah Produk/Komoditas OVOP (Komoditas)	245	245
2	Presentase koperasi sehat (%)	19,50	20,38
3	Presentase koperasi aktif (%)	82,50	82,50
4	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	13,57	13,51
5	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	35,10	34,50
6	Pertumbuhan Proyek PMA/PMDN (%)	12	54,92
7	Pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN (%)	12	15,00
8	Penyelesaian izin dan non izin sesuai SOP (%)	90	96,90
9	Tingkat Partisipasi angkatan kerja (%)	73,55	68,56
10	Rasio Kesempatan Kerja terhadap penduduk usia kerja (%)	72,63	65,50
11	Jumlah Kunjungan wisatawan nusantara (orang)	34.825.055	48.943.607
12	Jumlah Kunjungan wisatawan mancanegara (orang)	419.454	677.168

2. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin.
- a. Program yang mendukung prioritas ini adalah Program Pembangunan Perumahan; Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya; Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial; Program Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa; Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat dan Program Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.
- b. Indikator Kinerja Pembangunan yang mendukung penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk

masyarakat miskin sebanyak 5 Indikator seluruhnya mencapai target. Gambaran realisasi dari 5 indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.9. Realisasi Indikator Kinerja Prioritas Kedua Pembangunan Daerah Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Target 2018	Realisasi 2018
1	Rasio Rumah Layak Huni	78,78	83,10
2	Persentase penanganan PMKS (%)	0,69	1,10
3	Jumlah Desa Mandiri/Berdikari	100	100
4	Jumlah BUMDes yang difasilitasi (unit)	29	29
5	Jumlah kewirausahaan pemuda (orang)	2.000	2.000

3. Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar.
 - a. Program yang mendukung prioritas ini adalah Program Pendidikan Menengah; Program Pendidikan Khusus; Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit; Program Pelayanan Kesehatan; Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
 - b. Indikator Kinerja Pembangunan yang mendukung penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar sebanyak 12 indikator seluruhnya mencapai target. Gambaran realisasi dari 12 indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.10. Realisasi Indikator Kinerja Prioritas Ketiga Pembangunan Daerah Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Target 2018	Realisasi 2018
1	APK SMA/SMALB/MA/ SMK/ Paket C (%)	80	80,01
2	APM SMA/SMALB/MA/ SMK/ Paket C (%)	66	66,03
3	Angka Kelulusan SMA/ MA/ SMK (%)	99,99	99,99
4	% SMA/ SMALB/ MA/SMK yang terakreditasi	100	100
5	% Pendidik SMA/SMALB/MA/SMK berkualifikasi S1/D4	98,86	98,86
6	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 KH)	116	78,60
7	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 KH)	11	8,36
8	Angka Kematian Balita (AKBA) (per 1.000 KH)	11	9,48
9	Angka Kematian DBD (%)	<2	1,05
10	Angka Kesakitan DBD (per 100.000 penduduk)	<47	10,20
11	Jumlah sarana dan prasarana sosial (unit)	10	47
12	Persentase penguatan kapasitas PSKS (%)	1,64	3,98

4. Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan.

- a. Program yang mendukung prioritas ini adalah Program Pengembangan Agribisnis; Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian; Program Peningkatan Ketahanan Pangan; Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan; Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan; Program Pengembangan Perikanan Tangkap; Program Pengembangan Perikanan Budidaya; Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan; Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas; Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.
- b. Indikator Kinerja Pembangunan yang mendukung pencapaian Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan sebanyak 19 indikator. Sebanyak 16 indikator kinerja (84,21%) mencapai target dan 3 indikator kinerja (15,79%) belum mencapai target. Gambaran realisasi dari 19 indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.11. Realisasi Indikator Kinerja Prioritas Keempat Pembangunan Daerah Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Target 2018	Realisasi 2018
1	Produksi padi (ton)	10.351.427	11.536.595
2	Produksi Jagung (ton)	3.053.181	3.433.420
3	Produksi Kedele (ton)	154.795	162.964
4	Produksi Tebu (ton)	4.460.000	2.757.659
5	Produksi Daging (kg)	293.353.639	347.723.159
6	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	11,88	8,37
7	Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	1,45	1,40
8	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	2,39	2,50
9	Jumlah Regulasi Kedaulatan Pangan	1	1
10	Ketersediaan Pangan Utama Beras (ton)	5.816.198	6.277.465
11	Persentase Penguatan Cadangan Pangan (%)	100	137,29
12	Persentase Ketersediaan informasi pasokan, harga & akses pangan di daerah (%)	100	100
13	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	80	96,93
14	Persentase penanganan daerah rawan pangan (%)	60	100
15	Produksi perikanan tangkap (ton)	293.474,54	446.277,16
16	Produksi perikanan budidaya (ton)	509.436,29	510.324,49
17	Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	22,59	30,65
18	Rasio Elektrifikasi (%)	94,00	98,52
19	Persentase pemanfaatan EBT terhadap total konsumsi energi (%)	10,20	10,80

5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana.
 - a. Program yang mendukung prioritas ini adalah Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan; Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; Program Pengembangan Perhubungan Darat; Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya; Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku; Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai; Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi; Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan; Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam; Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

- b. Indikator Kinerja Pembangunan yang mendukung pencapaian Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana sebanyak 18 indikator. Sebanyak 17 indikator (94,44%) mencapai target dan 1 indikator kinerja (5,56%) belum mencapai target. Gambaran realisasi dari 18 indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.12. Realisasi Indikator Kinerja Prioritas Kelima Pembangunan Daerah Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Target 2018	Realisasi 2018
1	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik (%)	89,60	89,60
2	Persentase panjang jalan dengan lebar \geq 6,00 m (%)	77,87	77,87
3	Persentase panjang jalan provinsi sebagai jalan kolektor (MST \geq 8 ton) (%)	82,30	82,30
4	Terfasilitasinya pembangunan infrastruktur strategis	100	100
	Peningkatan ketersediaan prasarana keselamatan:		
5	-Jalan provinsi (%)	60	92,15
6	-Perlindungan KA di jalan provinsi (lokasi)	25	25
7	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	82,00	82,00
8	Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (%)	60,80	60,89
9	Menurunnya luasan daerah genangan akibat banjir (Ha)	3 % (menurunnya 5.000 Ha)	3,00 % (menurun sebesar 5.004 Ha menjadi 141.801 Ha)
	Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi (%):		
10	-Air Minum Perkotaan	79,5	82,89
11	-Air Minum Perdesaan	72,50	74,78
12	- Sanitasi	81,50	82,00
13	Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (%)	30	30,76
14	Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	0,93	0,47
15	Informasi status mutu air (%)	100	100

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Target 2018	Realisasi 2018
16	Informasi status mutu udara ambien (%)	100	100
17	Persentase pengaduan akibat dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (%)	100	100
18	Jumlah Desa Tangguh Bencana	68	106

6. Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.
- Program yang mendukung prioritas ini adalah Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan; Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat; Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan; Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan; Program Perencanaan Pembangunan Daerah; Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH; Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan; Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum; Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi; Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah; Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan; Program Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya; Program Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya; Program Pembinaan, Pembinaan dan Pemasayarakatan Olahraga; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan.
 - Indikator Kinerja Pembangunan yang mendukung pencapaian Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik sebanyak 27 Indikator, dengan 1 indikator yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) belum ada data realisasi capaiannya, karena baru akan dirilis BPS pada bulan Agustus 2019. Dari 26 indikator yang telah tersedia data realisasi capaiannya, sebanyak 23 indikator kinerja (88,46%) mencapai target dan 3 indikator (11,54%) belum mencapai target. Gambaran realisasi dari 27 indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.13. Realisasi Indikator Kinerja Prioritas Keenam Pembangunan Daerah Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Target 2018	Realisasi 2018
1	Persentase penanganan konflik sosial	100	100
2	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	70,5	NA
	Persentase penggunaan hak pilih dalam:		
3	- Pemilu gubernur dan wagub	75	73,19
4	- Pilkada kabupaten/kota	75	77,40
5	Rasio forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan	71,4	83,33
6	Persentase pelaksanaan rembug masyarakat dalam pengambilan keputusan (%)	100	100
7	Implementasi Aksi PPK	Prov dan 35 Kab/Kota	Prov dan 35 Kab/Kota

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Target 2018	Realisasi 2018
8	Jumlah OPD yang menerapkan SPIP (OPD)	48	48
9	Tingkat Maturitas SPIP (level)	Level 3	Level 3
10	Tingkat Kapabilitas APIP (level)	Level 3	Level 3
11	Jumlah peraturan perundang-undangan daerah yang disusun (perda)	15	14
12	Persentase penindakan pelanggaran perda (%)	100	100
13	Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang dilakukan pengukuran IKM (unit UPP)	28	146
14	Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang bersertifikasi ISO (unit UPP)	34	34
15	Persentase OPD yang mengembangkan teknologi informasi (%)	100	100
16	Jumlah PNS yang mengikuti sertifikasi kompetensi (orang)	50	560
17	Jumlah PNS yang melaksanakan tugas belajar dan ijin belajar (orang)	S3 : 4 S2 : 18	S3 : 6 S2 : 521
18	Opini BPK (WTP)	Prov dan 22 Kab/Kota	provinsi & 31 Kab/Kota
19	Persentase laporan keuangan daerah berbasis akrual (%)	100	100
20	Persentase deviden	7,10	7,27
21	Persentase penerapan wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi (%)	100	100
22	Persentase Kesiapsediaan komponen pendukung dan cadangan (%)	100	100
23	Persentase penerapan indikator SPM kesenian (Gelar Seni, Sarana Kesenian, Penyelenggaraan Misi Kesenian) (%)	100	100
24	Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	2,5	2,50
25	Penerapan kurikulum muatan lokal Bahasa Jawa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (%)	100	100
26	Persentase peningkatan prestasi olahraga (%)	25	25
27	Persentase cakupan <i>venue sport and youth center</i> Jatidiri yang memadai (%)	100	92,86